

## ABSTRAK

**Nurul Hikmah.** *Peran Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam Pemberdayaan Lanjut Usia Terlantar di Kota Banjarmasin*, Pembimbing Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI., pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2025.

**Kata Kunci:** Peran, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Lanjut Usia Terlantar

Jumlah lansia di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang turut berdampak pada meningkatnya jumlah lansia terlantar. Sebagai kelompok rentan, lansia membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama mereka yang berada dalam kondisi terlantar. Skripsi ini berfokus pada peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam upaya menyejahterakan lansia terlantar. Dengan mengambil studi kasus pada Dinas Sosial Kota Banjarmasin, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan peran tersebut serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris serta pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh secara langsung dari lapangan melalui observasi dan wawancara terhadap 14 informan, yang terdiri atas staf Dinas Sosial Kota Banjarmasin, pegawai rumah singgah, para lansia terlantar, dan para pendamping lansia. Penelitian dilaksanakan pada April hingga Mei 2025 di Kota Banjarmasin. Data yang terkumpul diolah dalam bentuk narasi deskriptif dan dianalisis dengan menggunakan perspektif Jim Ife dan Frank Tesoriero tentang peran.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam menyediakan fasilitas dan bantuan bagi lansia terlantar telah dilaksanakan, namun distribusinya masih belum merata dan belum optimal. Dinas ini menjalankan empat peran utama, yaitu: (1) peran fasilitatif yang mencakup penyediaan rumah singgah, pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan, layanan kesehatan, penyediaan alat bantu, serta bantuan uang tunai melalui Program Keluarga Harapan (PKH); (2) peran edukatif dengan memberikan bimbingan sosial dan keagamaan bagi lansia terlantar maupun keluarganya; (3) peran representasional, yaitu mewakili lansia terlantar dalam menjalin kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait lainnya guna memenuhi kebutuhan kesehatan serta mental-spiritual lansia terlantar; dan (4) peran teknis yang meliputi pengelolaan dan analisis data lansia terlantar di Kota Banjarmasin. Ketidakmerataan dan belum optimalnya upaya tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan pendanaan dalam penyediaan fasilitas bagi lansia terlantar.